OBIS
Jurnal Ekonomi dan Bisnis

p-ISSN 2654-7325
e-ISSN 2656-7695
Vol. 2 No. 1, September 2019

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

Fera Maulina [1)], Rhea [2)]
[1)]Budidaya Tanaman Pangan
[2)]Bahasa Inggris (Konsentrasi Business English & Management), Politeknik Tonggak Equator
[1)] email: fmauli.defas@gmail.com
[2)] email: katarinarhea1601@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to measure the local government financial performance of West Borneo Province for fiscal year 2013-2017 by using financial ratios analysis. The financial ratios used include: (1) Ratio of Local Financial Independence, (2) Degree of Fiscal Decentralization Ratio, (3) Effectiveness Ratio, (4) Efficiency Ratio, (5) Ratio of Harmony, and (6) Growth Ratio. The type of research used is descriptive research with a case study approach. The data used in this study is secondary data obtained from the Regional Finance and Revenue Management Agency of West Borneo Province. Based on the results of calculations and analysis of local financial performance, it can be concluded, that the pattern of the relationship between the level of regional independence of West Kalimantan Borneo is on "participatory" criteria. The degree of fiscal decentralization of the Government of West Borneo Province is in the category of "enough". The level of effectiveness is included in the "effective" category while the efficiency level is included in the "less efficient" category. Ratio of Harmony shows the balance of expenditure are not balanced and the Growth Ratio which is still fluctuating.

Keywords: Financial Ratios, Local Government Financial Performance

1. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan organisasi yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan bangsa dan negara. Salah satu tugas pokok pemerintah adalah untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya untuk mencapai kemajuan bersama. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditandai dengan pertambahan pendapatan daerah atau pertambahan hasil produksi dari barang ataupun jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu.

Otonomi daerah merupakan salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah demi mencapai kesejahteraan bersama. Otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Dengan dijalankannya otonomi daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi dari tiap daerah. Untuk itu pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah adalah dengan menganalisis laporan realisasi anggaran pada setiap periode. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Provinsi Kalimantan Barat dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017

realisasi PAD meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2016. Pada tahun 2016, realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 2,24% dibandingkan dengan tahun 2015. Selain itu, total pendapatan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 19,91%. Adapun untuk total belanja meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2016. Pada tahun 2016, total belanja mengalami penurunan sebesar 20% apabila dibandingkan dengan tahun 2015.

Laporan keuangan merupakan salah satu media utama dalam mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil dari laporan keuangan tersebut digunakan untuk membuat dasar pengambilan keputusan-keputusan berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Ini dikarenakan para pihak yang berkepentingan tersebut datang dari latar belakang yang berbeda dan belum tentu memahami sistem akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkanlah analisis laporan keuangan untuk membantu para pihak yang berkepentingan tersebut dalam memahami laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisis keuangan dapat dilakukan dengan beberapa metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Dengan dilakukannya analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi alat ukur bagi suatu daerah untuk menilai kinerja pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2013-2017.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat. Variabel yang digunakan meliputi: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Tingkat Rasio Desentralisasi Fiskal, (3) Rasio Efektivitas, (4) Rasio Efisiensi, (5) Rasio Harmoni, dan (6) Rasio Pertumbuhan.

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan hanya menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Salah satu faktor kunci suksesnya sebuah organisasi adalah sistem pengukuran kinerja yang andal (*reliable*). Sistem pengukuran kinerja yang efektif memberikan umpan balik bagi para pengelola dan para pembuat keputusan dimana hal ini penting untuk peningkatan pelayanan pemerintah yang terus menerus.

Menurut Ulum, (2012:30), "analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia." Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

   Ulum (2009, 31) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) "menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah." Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak ekstern (terutama pemerintah pusat) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

   Rasio Kemandirian

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi \& Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipasif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010) dalam Muhibtari (2014:37), "derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi".

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

3. Rasio Efektivitas

Ulum (2009, 31) menyatakan bahwa rasio efektivitas "menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanankan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah."

Rasio Efektivifitas

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

4. Rasio Efesiensi

Ulum (2009, 31) menyatakan bahwa rasio efisiensi adalah "rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima."

Semakin kecil rasio efisiensi berarti semakin baik kinerja pemerintah daerah. Elemen biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dalam konteks ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh dinas-dinas pengumpul PAD. Biaya tersebut termasuk biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Biaya langsung misalnya biaya gaji dan upah karyawan bagian pemungutan pajak dan retribusi daerah, sedangkan biaya tidak langsung misalnya biaya-biaya penyuluhan dan biaya iklan layanan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Rasio Efesiensi

$$= \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 40	Tidak Efisien
31 – 40	Kurang Efisien
21 – 30	Cukup Efisien
10 – 20	Efisien
Di bawah 10	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

5. Rasio Keserasian Belanja

Muhibtari (2014, 39) menyatakan bahwa analisis rasio keserasian belanja "bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah perlu membuat harmonisasi belanja dengan melakukan analisis keserasian belanja."

Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio keserasian belanja, antara lain:

- Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

$$= \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- Rasio Belanja Langsung terhadap APBD

$$= \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Analisis proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan.

6. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)

Ulum (2009, 33) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan (*growth ratio*) "digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya."

Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan } \sum \text{ Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan } \sum \text{ Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } \sum \text{ Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

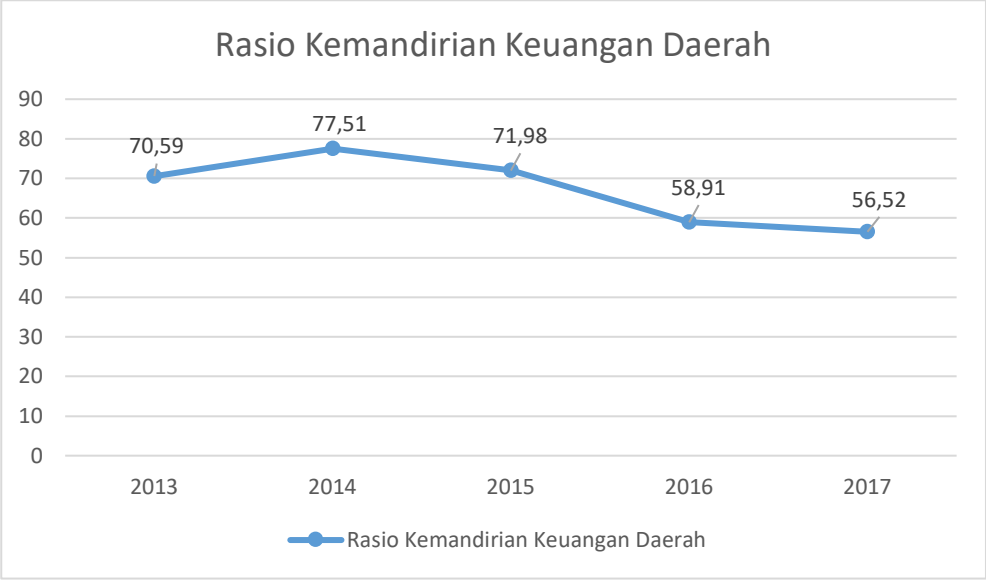

Gambar 1 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan data yang tercantum pada Gambar 1 di atas, dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2017 mengalami penurunan di setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2014. Pada tahun 2014, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar 6,92% sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar 13,07%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kebutuhan fiskal daerah yang terus bertambah tiap tahunnya. Kebutuhan fiskal yang bertambah harusnya terus diimbangi dengan peningkatan kinerja Pendapatan Asli Daerah. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat memang mengalami kenaikan di hampir setiap tahunnya, namun hal ini juga diikuti oleh perolehan Dana Perimbangan yang terus meningkat di setiap tahunnya. Dapat dilihat pada Tabel 1, komponen pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan hampir di setiap tahunnya adalah pendapatan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekeyaan daerah yang dipisahkan sedangkan pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang terus mengalami fluktuasi. Meskipun demikian, secara umum Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan

pola hubungan "Partisipatif", yakni berada pada kisaran 50%-75% di mana Pemerintah Daerah dianggap telah cukup mampu untuk melaksanakan urusan otonomi serta menggali potensi daerah yang dimiliki. Selain itu, cukup tingginya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern dalam hal ini Pemerintah Pusat semakin rendah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

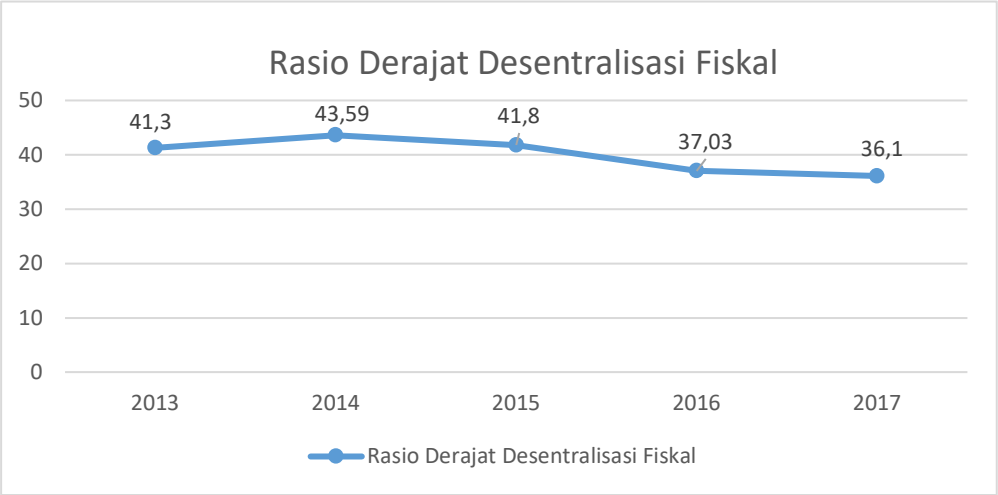

Gambar 2 Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan data yang tercantum pada Gambar 2 di atas, dapat diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2017 mengalami penurunan di setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2014. Pada tahun 2014, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal mengalami kenaikan sebesar 2,29% sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar 4,77%. Tingginya persentase menunjukkan bahwa semakin baiknya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Meskipun di hampir setiap tahunnya Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal cenderung mengalami penurunan, namun kecenderungan tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Penurunan yang terjadi untuk Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di tahun 2016 dan tahun 2017 disebabkan oleh meningkatnya pemberian Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Rata-rata kenaikan pemberian Dana Perimbangan mencapai 4,20%. Komponen Dana Perimbangan yang terus mengalami peningkatan antara lain dana alokasi umum, dana alokasi khusus serta dana penyesuaian otonomi khusus sedangkan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) merupakan komponen dana perimbangan yang mengalami fluktuasi. Apabila dilihat secara umum Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masih termasuk dalam kategori "Cukup", yakni berada pada kisaran 30,01%-40,00% di mana hal ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sudah cukup baik dalam pembangunan daerah. Pemerintah Daerah dinilai cukup baik dalam penyelenggaraan desentralisasi di mana dapat dilihat dari kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Rasio Efektifitas

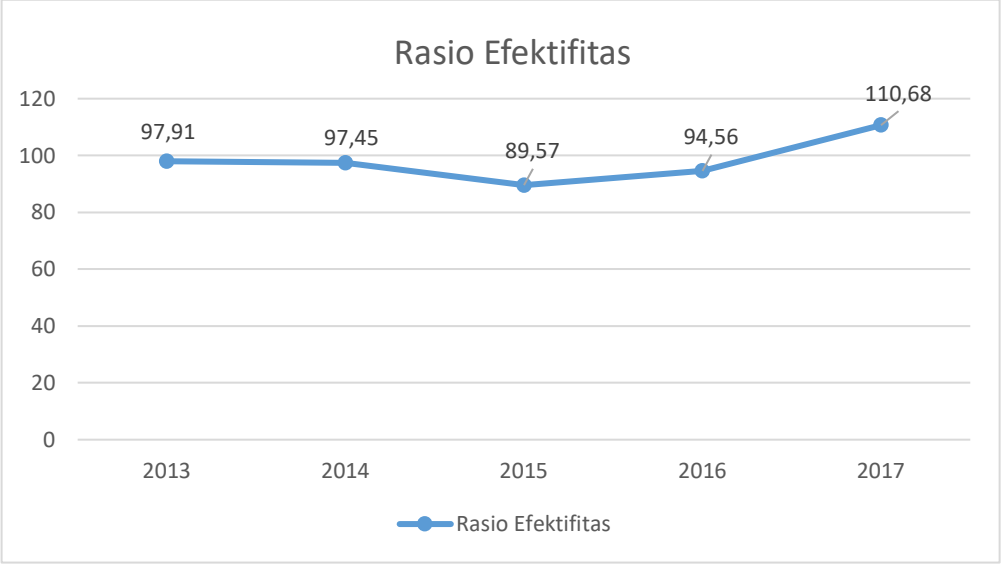

Gambar 3 Grafik Rasio Efektifitas

Berdasarkan data yang tercantum pada Gambar 3 di atas, dapat diketahui bahwa Rasio Efektifitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan diawal periode, yakni untuk periode tahun 2013-2015. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2015, yakni sebesar 7,88%. Sementara itu, pada periode tahun 2016 dan 2017, Rasio Efektifitas mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2017, yakni sebesar 16,12%. Apabila dilihat secara umum, Rasio Efektifitas termasuk dalam kategori "Efektif" di mana kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah semakin baik. Ini dikarenakan Pemerintah Daerah mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditargetkan. Hal ini dapat dilihat dari komponen pendapatan asli daerah yang selalu meningkat dan hampir mencapai target yang telah dianggarkan. Bahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang merupakan komponen pendapatan daerah selalu melampaui target yang dianggarkan. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat terus mengoptimalkan dan mempertahankan potensi-potensi daerah yang telah dimiliki oleh daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah antara lain mengefektifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan pengawasan kepada petugas pemungut pajak, mampu memproyeksikan potensi-potensi daerah yang sah, melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan pajak baru serta mamanfaatkan keunikan daerah dalam meraup pajak daerah. Selain itu, Pemerintah juga dapat mencari sumber-sumber pembiayaan yang baru baik melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun mengadakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Rasio Efisiensi

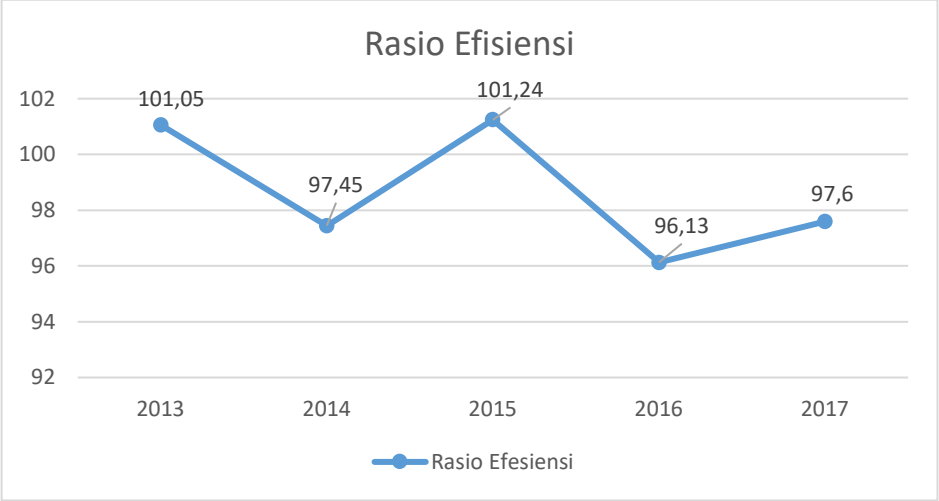

Gambar 4 Grafik Rasio Efisiensi

Berdasarkan data yang tercantum pada Gambar 4 di atas, dapat diketahui bahwa Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami ketidakstabilan. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2015, yakni sebesar 3,79% sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar 5,11%. Meskipun terjadi penurunan, apabila dilihat secara umum, Rasio Efisiensi masih termasuk ke dalam kategori "Kurang Efisien" di mana Pemerintah Daerah mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam melakukan pemungutan pendapatan. Total Pendapatan selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Rata-rata total pendapatan naik sebesar 2,20%. Meskipun demikian, kenaikan total pendapatan selalu diikuti dengan kenaikan total belanja daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih belum mampu untuk memperhitungkan alokasi fiskal yang digunakan dalam melaksanakan aktifitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah harus menekan biaya yang dikeluarkan di setiap tahun anggaran dan membuat skala prioritas pendanaan sehingga dapat mencapai sasaran secara optimal.

Rasio Keserasian Belanja

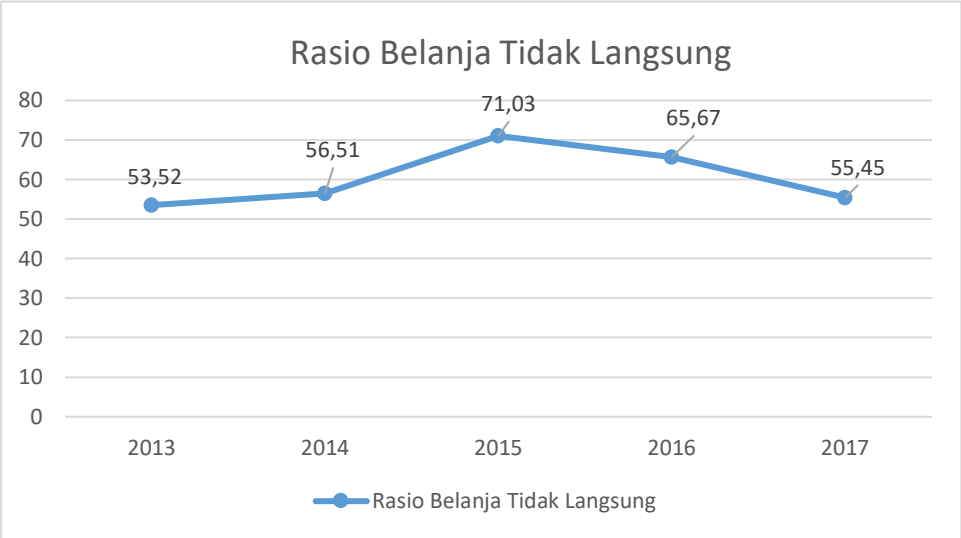

Gambar 5 Grafik Rasio Belanja Tidak Langsung

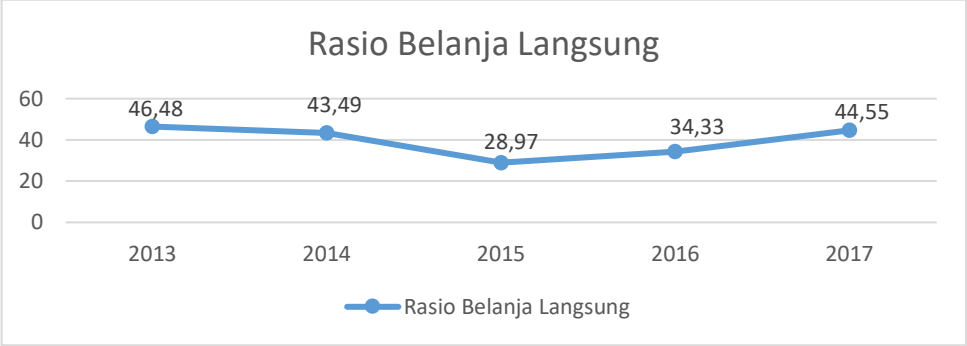

Gambar 6 Grafik Rasio Belanja Langsung

Berdasarkan data yang tercantum pada Gambar 5 dan Gambar 6 di atas, dapat diketahui bahwa Rasio Keserasian Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa keseimbangan antar belanja belum seimbang. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan Belanja Langsung. Pemerintah semestinya bisa lebih meningkatkan Belanja Langsung agar kualitas output meningkat sehingga fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik.

Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio)*

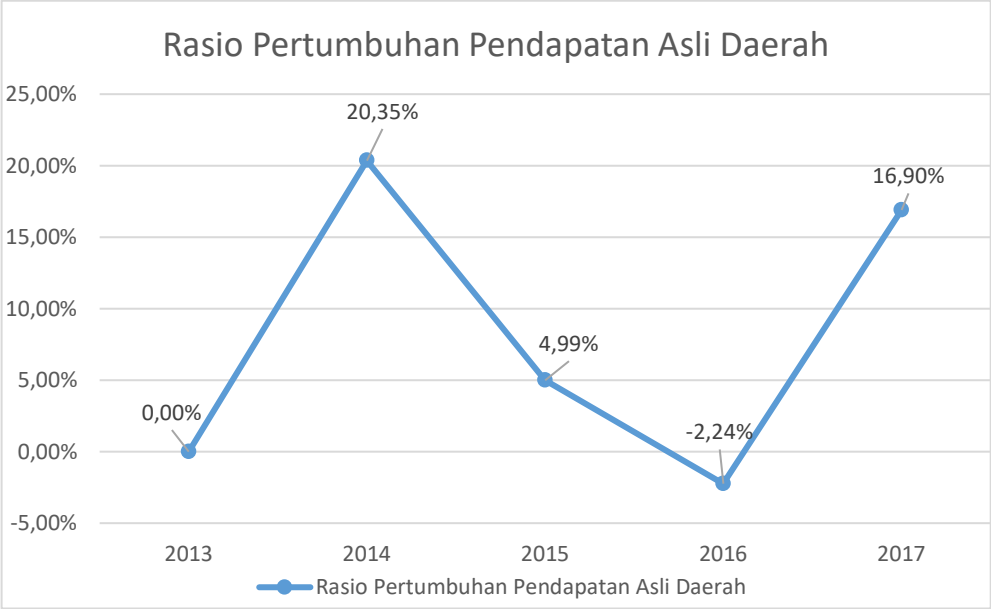

Gambar 7 Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

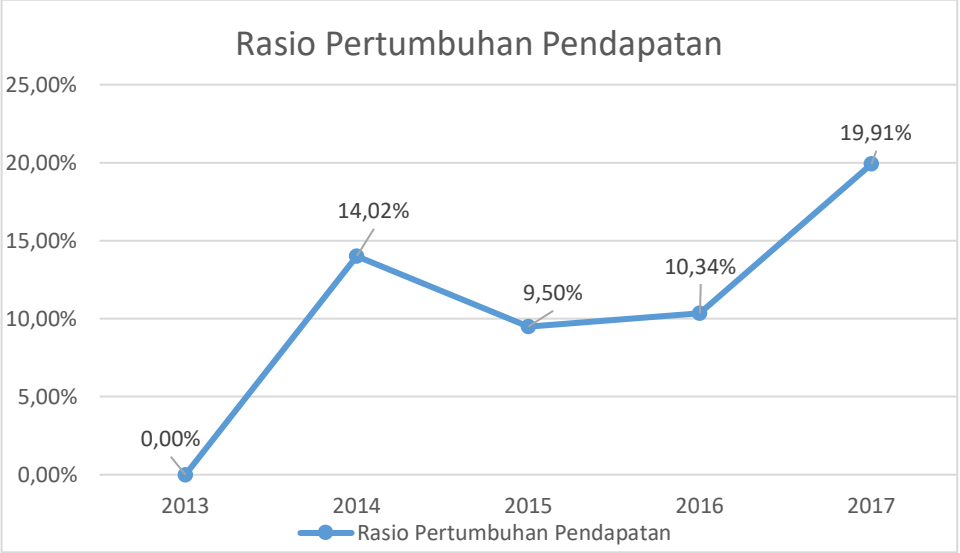

Gambar 8 Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Berdasarkan data yang tercantum pada Gambar 7 dan Gambar 8 di atas, dapat diketahui bahwa Rasio Pertumbuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada suatu periode sehingga jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kurang maksimal. Persentase yang mengalami fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih belum menggali potensi-potensi daerah secara maksimal. Provinsi Kalimantan Barat memiliki berbagai potensi daerah yang dapat digali untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Potensi tersebut antara lain destinasi wisata seperti pantai yang banyak diminati oleh masyarakat pada sektor pariwisata, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pada sektor jasa pelayanan, seperti jasa perhotelan dan penginapan, restoran dan café yang menjual makanan, pasar swalayan, serta jasa parkir kendaraan. Selain itu, Provinsi Kalimantan Barat secara geologi memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yaitu mineral logam. Provinsi Kalimantan Barat dikenal dengan jalur metalogen, yang berarti paling banyak memiliki kandungan mineral logam. Mineral logam yang dimiliki antara lain besi, perak, tembaga, emas, antimoni, mo, timbal dan lain-lain. Cadangan pertambangan di daerah Kalimantan Barat sangat melimpah, namun para pengusaha tambang masih seringkali mengabaikan aspek sosial dan lingkungan yang ada. Hal ini sangat berdampak langsung pada masyarakat yang tinggal pada daerah pertambangan tersebut. Masyarakat yang tinggal pada daerah dekat dengan lahan pertambangan tentu saja memiliki kearifan lokal tersendiri mengenai aspek sosial dan lingkungan mereka. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan maupun regulasi-regulasi terkait aspek sosial dan lingkungan hidup tersebut. Apabila sudah dapat dijalankan dengan baik, maka hal ini dapat menjadi modal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahsana dari analisis kinerja keuangan daerah provinsi Kalimantan Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola hubungan tingkat kemandirian daerah untuk tahun anggaran 2013-2017 secara umum berada pada kriteria Partisipatif. Kemandirian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kemampuan keuangan sedang dalam memenuhi kebutuhan dana dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2013-2017 apabila dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berada dalam kategori Cukup. Hal ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah sudah cukup baik dalam pembangunan daerah.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2013-2017 apabila dilihat dari Rasio Efektifitas termasuk dalam kategori Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mampu untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditargetkan.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2013-2017 apabila dilihat dari Rasio Efisiensi termasuk dalam kategori Kurang Efisien. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan.
5. Hasil perhitungan Rasio Keserasian Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2013-2017 menunjukkan belum adanya keseimbangan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pemerintah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan belanja langsung. Semestinya Pemerintah bisa lebih meningkatkan Belanja Langsung agar kualitas output meningkat sehingga fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik.
6. Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2013-2017 berdasarkan Rasio Pertumbuhan mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya jumlah Pendapatan yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun saran yang diberikan penulis berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Barat. Potensi tersebut antara lain destinasi wisata seperti pantai pada sektor pariwisata, jasa pelayanan seperti perhotelan, restoran, pasar swalayan, dan jasa parkir kendaraan, serta pada sektor pertambangan. Jika Pemerintah mampu memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak yang merupakan komponen utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah akan semakin meningkat. Selain itu, Pemerintah juga diharapkan dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan sehingga meningkatkan efisiensi kinerja. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga harus meningkatkan pengawasan terhadap pihak yang berhubungan langsung dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya tindak kecurangan yang terjadi. Besarnya pajak dan retribusi daerah tidak hanya sebagai penopang utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk turut mendukung dan berpartisipasi aktif dalam peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara membayar pajak dan retribusi daerah sehingga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana lebih baik lagi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengulas lebih dalam kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio yang lebih lengkap seperti Debt *Service Coverage Ratio*, Analisis Indeks Kemampuan Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan Belanja, dan Rasio aktifitas sehingga dapat lebih baik lagi dalam menggambarkan kondisi keuangan. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup wilayah penelitian dan tidak hanya mengambil dari satu provinsi saja.

5. REFERENSI

Bungin, H. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.* Edisi 1. Jakarta: Kencana.

Martono, Nanang. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Edisi 3. Depok: RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan-25. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Ulum MD, Ihyaul. 2012. *Audit Sektor Publik.* Edisi 1. Cetakan 2. Jakarta: PT Bumi Aksara.